

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MEMORANDUM
NOMOR 46 /PSDKP.4/TU.140/I/2024

Yth. : Direktur Jenderal PSDKP
Dari : Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2023
Lampiran : - (satu) Berkas
Tanggal : 19 Januari 2024

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan Laporan Tahun 2023, terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tahun 2023 sebagaimana terlampir pada link <https://s.id/LKjDirektoratPPSDP2023> .

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Direktur Jenderal PSDKP kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Drama Panca Putra

Tembusan:
Sesditjen PSDKP



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PPSDP) dalam mencapai tujuan dan sasaran selama tiga bulan kedua di tahun 2023. Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini merupakan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Masukan, tanggapan, serta saran yang membangun bagi pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan sangat dibutuhkan untuk dijadikan perbaikan dalam pencapaian target kinerja Direktorat PPSDP di masa depan.

Jakarta, 18 Januari 2023

Direktur Pengawasan Pengelolaan
Sumber Daya Perikanan,



Drama Panca Putra

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Laporan Kinerja Direktorat PPSDP tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Informasi indikator kinerja berisi informasi sasaran strategis, definisi, formula perhitungan/pengukuran, satuan pengukuran, jenis aspek target pada SKP, validitas, unit/pihak penanggung jawab, sumber daya, status data, jenis konsolidasi data, metode *cascading*, klasifikasi/polarisasi dan periode pelaporan.

Selama periode tahun 2023, Direktorat PPSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang ditetapkan dengan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **114,88%** dengan kategori istimewa. Pencapaian Nilai Pemahaman Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan yang Bertanggung Jawab sebesar **88,53**. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan sebesar **100%**. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional sebesar **100**. Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan sebesar **100**. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan sebesar **81,10**. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP sebesar **80,63**. Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) sebesar **86,45**.

Kemudian, pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan subansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan sebesar **100%**. Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDP sebesar **100**. Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP sebesar **89**. Inovasi pengawasan sumber daya perikanan yang dihasilkan sebanyak **1** inovasi. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDP sebesar **110%**. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP sebesar **84**. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PPSDP sebesar **82,60**. Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan sebesar **75%**. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Direktorat PPSDP sebesar **25,67**. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat PPSDP sebesar **112, 50%**. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP sebesar **100**. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat PPSDP sebesar **88,75**.

Direktorat PPSDP memiliki alokasi anggaran awal TA 2023 sebesar Rp7,850,000,000. Setelah mengalami Automatic Adjustment (AA) 1 kali kemudian dana tersebut dialihkan ke satuan kerja lain sehingga total anggaran Direktorat PPSDP menjadi Rp5,668,485,000. Pada tahun 2023 telah dilakukan revisi POK sebanyak 8 kali dan diperoleh nilai efisiensi sebesar **3,68**.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sehingga dapat meningkatkan pencapaian kinerja pengawasan sumber daya perikanan di periode berikutnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
2.1 RENCANA STRATEGIS	4
2.2 PERJANJIAN KERJA	9
2.3 TARGET KINERJA	11
2.4 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA.....	12
2.5 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 CAPAIAN KINERJA.....	18
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA	20
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	54
BAB IV PENUTUP	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan dilaksanakan oleh Satker Pusat dan Satker UPT. Satker Pusat memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Objek pengawasan berupa pelaku usaha penangkapan ikan, pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, pelaku usaha pembudidayaan ikan dan pelaku usaha distribusi hasil perikanan yang merupakan sebuah alat produksi pengelolaan perikanan serta aktivitasnya bersinggungan dengan ketersediaan sumber daya. Konsepsi pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perikanan yang dibangun yaitu setiap alat produksi melakukan aktivitas usaha, maka pengawasan perikanan hadir guna memastikan aktivitas usaha tersebut sesuai ketentuan.

Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dapat dicapai melalui beberapa pendekatan, dimana salah satunya yaitu pendekatan preventif, partisipatif dan koordinatif. Rincian output koordinasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan menggambarkan sebuah upaya Satker pusat untuk melakukan pendekatan berupa koordinasi, baik internal dan eksternal dalam kerangka pengawasan perikanan. Adapun hasil akhir yang hendak dicapai berupa kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

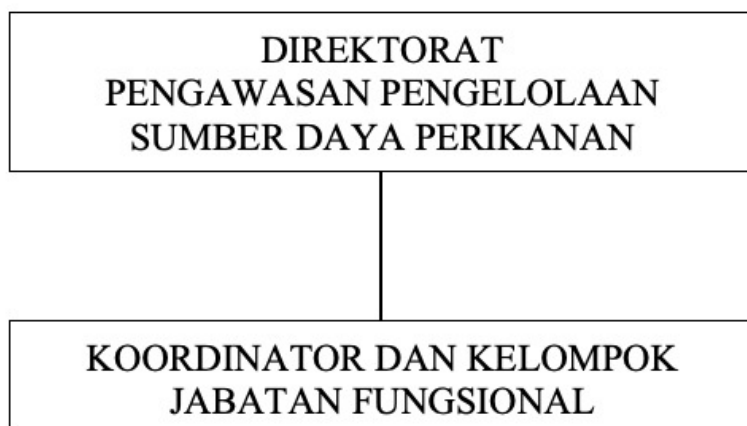
Laporan Kinerja Triwulan I Direktorat PPSDP tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaankinerja dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan perikanan selama tiga bulan pertama di tahun 2023.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PPSDP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PPSDP) sebagai salah satu bagian dari DJPSDKP mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan (penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, dan distribusi hasil perikanan) termasuk pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat PPSDP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 50 Pegawai Pusat terdiri atas 1 (satu) orang Direktur, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Utama sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Madya sebanyak 6 (enam) orang, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda sebanyak 8 (delapan) orang, Pejabat Fungsional Perencana Muda sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama sebanyak 1 (satu) orang, Analis Pengawasan SDKP sebanyak 17 (tujuh belas) orang, Analis SDM Aparatur sebanyak 1 (satu) orang, Analis Keuangan sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Arsiparis Terampil sebanyak 1 (satu) orang, Pengelola Keuangan sebanyak 1 (satu) orang,

Pengawas Perikanan yang tersebar di 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP serta 8 (delapan) orang Pegawai Kontrak.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PPSDP

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi Direktorat PPSDP serta sistematika pelaporan.
- **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan tentang sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja Direktorat PPSDP, dan pengukuran capaian kinerja.
- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan tentang analisis dan evaluasi pencapaian kinerja
- **Bab IV Penutup**, menyimpulkan secara menyeluruh Laporan Kinerja Direktorat PPSDP Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi perbaikan di masa depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tahap awal dalam siklus penyelenggaraan SAKIP. Komponen Perencanaan kinerja yang disusun oleh Direktorat PPSDP meliputi:

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Direktorat Jenderal PSDKP telah menetapkan Renstra tahun 2020 – 2024 yang merupakan penjabaran teknis secara berjenjang dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP sebagai salah satu unit Eselon I lingkup KKP. Renstra Ditjen. PSDKP memiliki nilai strategis karena merupakan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020 – 2024. Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2024 berpedoman pada RPJMN 2020 – 2024 (Perpres 18 Tahun 2020) dengan memperhatikan arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) serta mempertimbangkan arahan MKP kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen. PSDKP).

Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang

mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi : “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”.

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020 – 2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020 – 2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020 – 2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020 – 2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Sasaran Program Ditjen. PSDKP 2021-2024

No.	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen PSDKP (Sebab)	Keterangan
SS-6	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ikut berkontribusi menciptakan tata kelola SDKP yang bertanggung jawab
		Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan KP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Efektifnya pemantauan dan operasi armada ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif


	perikanan yang integratif	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Tuntasnya penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Baiknya tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP

3. Indikator Kinerja

Sebagai penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020 – 2024 yang dijabarkan oleh Arah Kebijakan, Strategi, dan Pengarusutamaan (mainstreaming) serta Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Ditjen. PSDKP tahun 2020 – 2024 maka disusunlah Kerangka Kinerja dan Pendanaan Ditjen. PSDKP tahun 2020 – 2024. Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

No.	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat <i>Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)</i>	85	86	87	88	90
2.	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat <i>Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)</i>	94	95	96	97	98
3.	Pemantauan dan Operasi Armada efektif <i>Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)</i> <i>Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)</i>	54,18 86,72	60 87	65 87,5	70 88	75 89
4.	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas <i>Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)</i>	93	93	93	93	93
Program: Dukungan Manajemen						
5.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP <i>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i> <i>Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)</i> <i>Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)</i> <i>Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)</i> <i>Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)</i> <i>Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)</i> <i>Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)</i> <i>Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)</i> <i>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)</i> <i>Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)</i> <i>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i>	30 4 1 72 87,00 1 3 82 60 88 85	31 5 1 73 87,15 1 3 84 65 89 86	32 6 1 74 87,25 1 3 86 70 89 87	33 7 1 75 87,50 1 3 88 75 90 88	34 8 1 76 87,75 1 3 90 80 90 88



Direktorat PPSDP sebagai salah satu bagian dari Direktorat Jenderal PSDKP, menetapkan Sasaran Strategis tahun 2020 – 2024 menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang disesuaikan dengan bisnis proses di Kementerian melalui penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran ke dalam suatu Peta Strategi dengan empat perspektif yang saling terkait, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customer*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learn and growth*.

1) Perspektif Stakeholder

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan Organisasi untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu Organisasi.

2) Perspektif Customer

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan Organisasi untuk memenuhi harapan pengguna layanan (*customer*). Pengguna layanan (*customer*) adalah pihak eksternal yang terkait langsung dengan pelayanan organisasi.

3) Perspektif Internal Process

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola Organisasi, untuk memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (*value chain*).

4) Perspektif Learn and Growth

Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi sumber daya internal Organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh Organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome Organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

2.2 PERJANJIAN KERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai. Tahun 2022 ditetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 12 (dua belas) Indikator Kinerja. Sebagai Sasaran Program dan Indikator kinerja yang mengalami perubahan dan penambahan pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Perjanjian Kinerja Direktorat PPSDP Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN			
01	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang meningkat	01 Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab (Nilai)	73
02	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	02 Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	80%
03	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	03 Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional (Nilai)	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
		04	Nilai kualitas penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Nilai)	80
		05	Persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan (%)	75%
		06	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP (Nilai)	80
		07	Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) (Nilai)	75
		08	Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan subtansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan (%)	75%
		09	Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDP (Nilai)	100
		10	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP (Nilai)	77
		11	Inovasi yang dihasilkan Direktorat PPSDP (Inovasi)	1
04	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat PPSDP	12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDP (%)	100%
		13	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP (Indeks)	78
		14	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PPSDP (Nilai)	80,5
		15	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75%
		16	Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Direktorat PPSDP (Nilai)	21
		17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP (%)	92%

		18	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP (%)	77,5%
		19	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup Direktorat PPSDP (%)	77,5%

2.3 TARGET KINERJA

Target Kinerja adalah standar minimal pencapaian Kinerja yang ditetapkan untuk periode tertentu. Penetapan Target Kinerja merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan serta mempertimbangkan usulan pengelola Kinerja Organisasi. Rincian Target kinerja Direktorat PPSDP Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1.3. Rincian Target Kinerja Dit. PPSDP Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	POLA AKUMULASI PERHITUNGAN TARGET	TARGET 2023					
			TW I	TW II	s.d SMT 1	TW III	TW IV	s.d SMT 2
1 Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang meningkat	1 Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab (Nilai)	Posisi Akhir	-	-	-	-	73	73
2 Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	2 Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	Posisi Akhir	-	-	-	-	80%	80%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	POLA AKUMULASI PERHITUNGAN TARGET	TARGET 2023					
			TW I	TW II	s.d SMT 1	TW III	TW IV	s.d SMT 2
3 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	3 Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional (Nilai)	Posisi Akhir	-	-	-	-	100	100
	4 Nilai kualitas penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Nilai)	Posisi Akhir	50	60	60	70	80	80
	5 Persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan (%)	Posisi Akhir	25%	55%	55%	65%	75%	75%
	6 Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP (Nilai)	Posisi Akhir	-	-	-	-	80	80
	7 Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) (Nilai)	Posisi Akhir	-	-	-	-	75	75
	8 Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan subtansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan (%)	Posisi Akhir	-	-	-	-	75%	75%
	9 Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDP (Nilai)	Posisi Akhir	-	50	50	-	100	100
	10 Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP (Nilai)	Posisi Akhir	-	-	-	-	77	77
	11 Inovasi yang dihasilkan Direktorat PPSDP (Inovasi)	Posisi Akhir	-	-	-	-	1	1

2.4 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Rencana aksi merupakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai Target, yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan. Rencana aksi bersifat spesifik dan berjumlah lebih dari satu. Rencana aksi kegiatan Direktorat PSDKP adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan

Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja Persentase Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan dengan target 80%. Beberapa kegiatan pendukung pada sasaran strategis ini disajikan pada Tabel 3. berikut:

Tabel 1.4. Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Terselenggaranya Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

KEGIATAN PENDUKUNG (OUTPUT/KOMPONEN RKAKL)	ANGGARAN/PAGU (RP 000)	SATUAN OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha yang dipantau	705.999	laporan	2							1			1			
1 Penyusunan rencana pengembangan kompetensi teknis pengawas perikanan	178.840															
2 Bimbingan Teknis Simulasi Pengawasan Program Penangkapan Ikan Terukur	186.523															
3 Bimbingan Teknis Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Berbasis Risiko	302.896															

4	Monev Pengembangan teknis pengawas perikanan	37.740																	
---	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Terselenggaranya Penyiadartahuan Masyarakat Bidang Pengawasan

Sasaran strategis ini memiliki indikator nilai pemahaman presentase kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan dengan target Nilai Pemahaman Peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sebesar 73. Kegiatan pendukung pada sasaran strategis ini disajikan pada Tabel 4. berikut:

Tabel 1.5. Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Terselenggaranya Penyiadartahuan Masyarakat Bidang Pengawasan

KEGIATAN PENDUKUNG (OUTPUT/KOMPONEN RKAAL)	ANGGARAN/PAGU (RP 000)	SATUAN OUTPUT / KOMPONEN	TARGET OUTPUT / KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN															
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des				
Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya Perikanan	1.000.000	orang	500											100	200	200			
1 Perencanaan sosialisasi dan diseminasi	353.160																		
2 Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi	626.185																		
3 Evaluasi sosialisasi dan diseminasi	20.655																		

2.5 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulan/semester/tahun sesuai indikator kinerja. Setiap indikator kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Informasi indikator kinerja. Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih target kinerja sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Informasi indikator kinerja berisi informasi sasaran strategis, definisi, formula perhitungan/pengukuran, satuan pengukuran, jenis aspek target pada SKP, validitas, unit/pihak penanggung jawab, sumber daya, status data, jenis konsolidasi data, metode cascading, klasifikasi/polarisasi dan periode pelaporan. Hal ini sebagai pedoman agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa indikator kinerja dan capaiannya.

1. Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif

Nilai pemahaman masyarakat dalam bidang pengawasan sumber daya perikanan adalah sebuah ukuran untuk menilai tingkatan kemampuan masyarakat atau stakeholder perikanan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan/atau melakukan kegiatan usaha perikanan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Responden merupakan pelaku usaha di bidang perikanan, para tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat, asosiasi di bidang perikanan serta masyarakat perikanan yang memperoleh penyadartahuan dengan metode random sampling.

Formula:

$$X_{sadar} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

X_{sadar} = Nilai rata-rata pemahaman masyarakat di bidang pengawasan sumber daya perikanan

X_i = Jumlah nilai kuesioner pemahaman masyarakat bidang pengawasan sumber daya perikanan

n = Jumlah responden

Parameter Nilai:

Nilai Pemahaman Sangat Baik	:	>71
Nilai Pemahaman Baik	:	61 - 70
Nilai Pemahaman Cukup Baik	:	50 - 60
Nilai Pemahaman Kurang	:	< 50

2. Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan

Intelijen ialah kegiatan yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Data dan informasi intelijen perikanan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Pengawas Perikanan atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi.

Penyelesaian analisis data dan informasi intelijen perikanan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah diolah atau dianalisis yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh. Target 80%.

Formula:

$$X_{intl} = \frac{a}{b} \times 100\%$$



Keterangan:

- X_{intl} = Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan
- a = Jumlah data dan informasi intelijen perikanan yang diselesaikan analisisnya
- b = Jumlah data dan informasi intelijen perikanan yang diterima/dikumpulkan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Sepanjang tahun 2023, Direktorat PPSPD telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,88%. Nilai tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh sasaran. Adapun nilai setiap sasaran merupakan hasil perhitungan atas IKU yang menjadi parameter pencapaiannya. Rincian pencapaian setiap sasaran dijelaskan pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6. Pencapaian Kinerja Direktorat PPSPD Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	CAPAIAN TAHUNAN	%TASE CAPAIAN
Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang meningkat	1 Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab (Nilai)	73	88,53	121
Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	2 Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	80	100	125
Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	3 Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional (Nilai)	100	100	100
	4 Nilai kualitas penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Nilai)	80	100	125
	5 Persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan (%)	75	81,10	108

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	CAPAIAN TAHUNAN	%TASE CAPAIAN	
	6	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP (Nilai)	80	80,63	101
	7	Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) (Nilai)	75	86,45	115
	8	Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan subtansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan (%)	75	100	133
	9	Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDP (Nilai)	100	100	100
	10	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSPDP (Nilai)	77	89	116
	11	Inovasi yang dihasilkan Direktorat PPSPDP (Inovasi)	1	1	100
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat PPSPDP	12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSPDP (%)	100	110	110
	13	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSPDP (Indeks)	78	84	108
	14	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PPSPDP (Nilai)	80,5	82,60	103
	15	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSPDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	100
	16	Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Direktorat PPSPDP (Nilai)	21	25,67	122
	17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSPDP (%)	92	112,50	122

	18	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP (%)	77,5	100	129
	19	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup Direktorat PPSDP (%)	77,5	88,75	115

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Direktorat PPSDP telah melaksanakan kegiatan pada Tahun 2023 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap Sasaran Strategis.

SS1 – Terselenggaranya Penyardartahuan Masyarakat Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang Efektif

1. Nilai Pemahaman Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan yang Bertanggungjawab

Nilai pemahaman peserta kegiatan penyardartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan adalah sebuah ukuran untuk menilai tingkatan kemampuan masyarakat atau *stakeholder* perikanan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan/atau melakukan kegiatan usaha perikanan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Daftar kegiatan penyardartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PPSDP dijelaskan pada Tabel 1.7 sebagai berikut:

Tabel 1.7. Daftar Penyardartahuan Direktorat PPSDP Tahun 2023

Kegiatan	Lokasi	Peserta	Jumlah Nilai Post Test
Sosialisasi Kebijakan Larangan Pembudidayaan Ikan yang Membahayakan dan Merugikan	Yogyakarta	70	5800
Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Usaha Pengolahan Ikan	Surabaya	125	11710
Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Lalu Lintas Produk Hasil Perikanan	Bogor	125	11210

Kegiatan	Lokasi	Peserta	Jumlah Nilai Post Test
Sosialisasi Penggunaan Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang dan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur	Lampung	300	26170

Kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan Tahun 2023 telah mencapai target dengan memperoleh total nilai sebesar 88,53 dari target sebesar 73 dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab

$$X_{\text{sadar}} : \sum_{i=1}^n \frac{(x_i + \dots + x_n)}{n} = \frac{54890}{620} = 88,53$$

Keterangan:

- X_{sadar} : Nilai rata-rata pemahaman masyarakat di bidang pengawasan sumber daya perikanan
 Jumlah nilai kuesioner pemahaman masyarakat bidang pengawasan sumber daya perikanan
 x_i :
 n : Jumlah responden

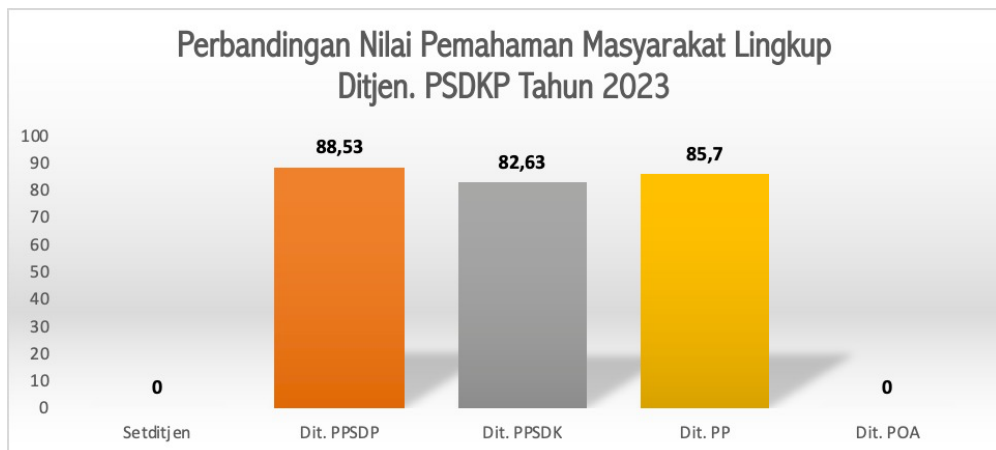
Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya terjadi grafik kenaikan nilai penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan.

Tabel 1.8. Perbandingan ngan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023	2024	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Tingkat pemahaman peserta penyadartahuan masyarakat bidang PPSPD	70	70	71	89	72	86,16	73	88,53	80

Kemudian, jika dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2023, Direktorat PPSPD menduduki urutan pertama, lebih unggul dari Direktorat PPSDK dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Grafik 1.1. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Berdasarkan capaian nilai tahun 2023 diketahui bahwa antusias masyarakat terhadap materi yang disampaikan narasumber sudah sangat baik, terlihat dari tingkat pemahaman peserta yang melebihi target yang telah ditetapkan, dan mendapatkan kategori nilai pemahaman sangat baik.

SS2 – Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan

2. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)

Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan Tahun 2023 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan nilai perolehan yaitu 100% dari target sebesar 80%. Penyelesaian analisis data dan informasi intelijen perikanan berdasarkan data intelijen yang telah dianalisis yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/penindakan yang akan ditempuh.

Kegiatan Intelijen Perikanan Tahun 2023 telah dilakukan di 11 lokasi Kabupaten/Kota yang menjadi target dan telah dianalisis seluruhnya. Data dan informasi intelijen perikanan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Pengawas Perikanan atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber

daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Adapun penghitungannya sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan

$$X_{intl} = \frac{a}{b} \times 100 = \frac{11}{11} \times 100 = 100$$

- X_{intl} : Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan
- a : Jumlah data dan informasi intelijen perikanan yang diselesaikan analisisnya
- b : Jumlah data dan informasi intelijen perikanan yang diterima/dikumpulkan

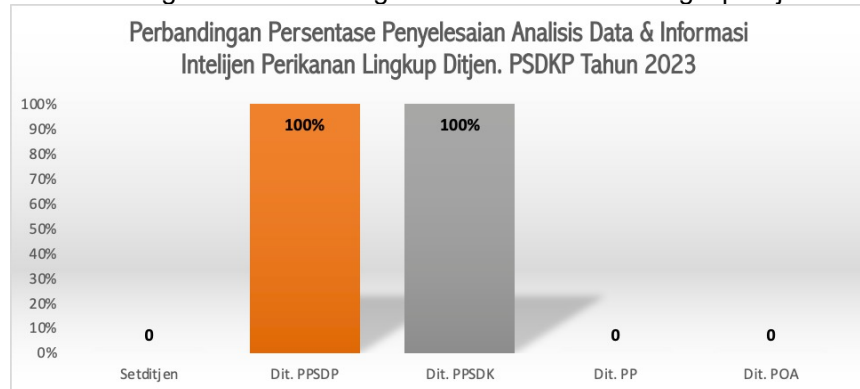
Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023. Meskipun merupakan indikator kinerja baru namun indikator kinerja Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan Tahun 2023 ini mencapai nilai maksimal. Hal tersebut didukung oleh usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan data dan informasi yang dijalankan dengan akuntabel. Keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh SDM dalam menganalisis data dan informasi yang diterima dengan tepat waktu dan profesional.

Tabel 1.9. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	0	0	0	0	0	0	80	100	0

Kemudian, jika dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2023, realisasi indikator ini Direktorat PPSDP berkedudukan sama dengan Direktorat PPSDK.

Grafik 1.2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Dengan demikian target tahun 2024 akan tercapai apabila penyampaian hasil analisis data dan informasi intelijen perikanan dilakukan dengan lebih implementatif dan terkoordinasi.

IK3 – Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan yang Sesuai Ketentuan

3. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional (Nilai)

Pemeriksaan pelaku usaha yang mendapat atensi pimpinan pada tahun 2023 salah satunya adalah kegiatan lalu lintas komoditas Benih Bening Lobster (BBL). Pada tahun 2023, terdapat kegiatan pengawasan kepada pelaku usaha distribusi BBL di beberapa titik dan pengawasan pencegahan serta penindakan distribusi BBL ke luar negeri. Seluruh rangkaian pemeriksaan dan pengawasan telah dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dinilai berdasarkan akumulasi kriteria persiapan, pemeriksaan/pengawasan, dan pelaporan yang telah dilaksanakan. Indikator ini telah mencapai target sebesar 100% dari target tahunan yaitu 100% .

Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional

$$X_{PPSDP} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i + \dots + x_n)}{n} = \frac{4500}{45} = 100$$

- X_{PPSDP} : Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak
 x_i : Nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan
 n : Jumlah pelaku usaha pemanfaatan SDP yang diperiksa kepatuhannya

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023. Meskipun merupakan indikator kinerja baru namun indikator kinerja Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau berdampak Nasional Tahun 2023 ini mencapai nilai maksimal.

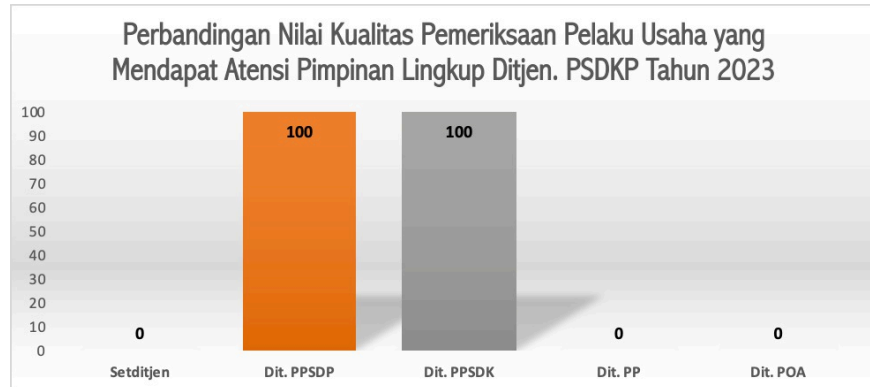
Hal tersebut didukung oleh setiap persiapan, pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan dan pelaporan dilakukan secara optimal. Faktor keberhasilan tercapainya target indikator ini juga didukung oleh SDM Pusat dan UPT serta perwakilan setiap K/L dan *stakeholder* terkait yang terus berkolaborasi dan bersinergi dalam tahapan persiapan, pemeriksaan/pengawasan, hingga pelaporan pasca kegiatan.

Tabel 1.10. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional (Nilai)	0	0	0	0	0	0	100	100	0

Kemudian, jika dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2023, realisasi indikator ini Direktorat PPSDP berkedudukan sama dengan Direktorat PPSDK.

Grafik 1.3. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Dengan demikian target 2024 akan tercapai apabila perencanaan, persiapan, dan koordinasi dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan dapat dilakukan secara optimal.

4. Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)

Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan tercapai dengan nilai sebesar 100. Data capaian dihitung berdasarkan nilai tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diverifikasi.

Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan

$$X_{VER} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i + \dots + x_n)}{n} = \frac{252200}{2522} = 100$$

X_{VER} = Nilai Kualitas penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
 x_i = Nilai capaian tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
 n = Jumlah hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diverifikasi

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023. Meskipun merupakan indikator kinerja baru namun indikator kinerja Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan ini mencapai nilai maksimal. Hal tersebut didukung oleh pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha perikanan yang dilengkapi dengan data dukung pengawasan secara lengkap berupa Surat Tugas, Surat Pemberitahuan, BAP dan Form Penilaian Kepatuhan Teknis.

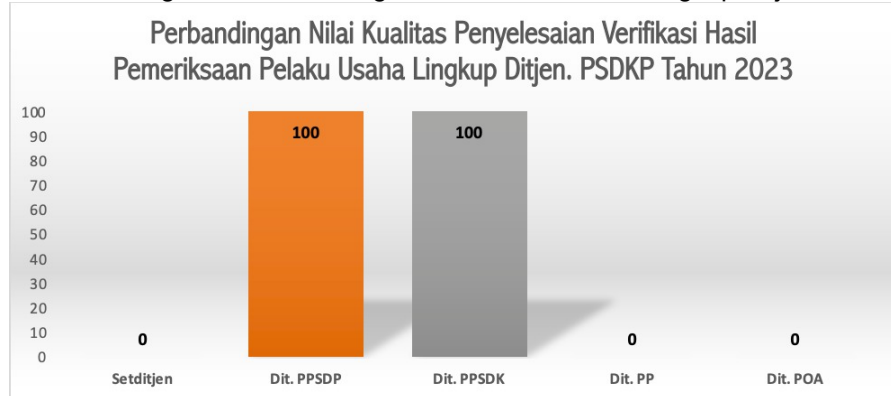
Selain itu, hal tersebut didukung juga oleh SDM Pusat dan UPT PSDKP yang telah melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021. Hal ini mendukung penyelesaian verifikasi yang dilakukan oleh Direktorat PPSDP terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh UPT PSDKP.

Tabel 1.11. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Nilai kualitas penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Nilai)	0	0	0	0	0	0	80	100	0

Kemudian, jika dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2023, realisasi indikator ini Direktorat PPSDP berkedudukan sama dengan Direktorat PPSDK.

Grafik 1.4. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Melihat hasil capaian di tahun 2023, maka target tahun 2024 dapat tercapai dengan catatan Pengawas Perikanan yang ada di Pusat maupun UPT PSDKP dapat melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021.

5. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan (%)

Persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan tercapai dengan nilai sebesar 81,10%. Data capaian dihitung berdasarkan jumlah tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diselesaikan dibagi dengan total rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan. Berdasarkan hasil verifikasi terdapat 164 kode proyek yang mendapat rekomendasi pembinaan dan perbaikan. Dari 164 kode proyek tersebut, sebanyak 133 kode proyek telah disampaikan kepada Eselon I teknis, sehingga nilai capaian sebesar 81,10% dari target sebesar 80%.

Persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan

$$X_{PPKP} = \frac{a}{b} \times 100\% = \frac{133}{164} \times 100 = 81,10$$

X_{PPKP} Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan
 Jumlah rekomendasi tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diselesaikan
 a
 b Total rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023. Meskipun merupakan indikator kinerja baru, namun indikator kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan ini melebihi target tahunan. Hal tersebut didukung dengan adanya penyampaian nota dinas dari Direktorat PPSDP kepada Unit Kerja Pembina Teknis (Ditjen PDSPKP, Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budi Daya). Nota Dinas yang disampaikan dalam rangka menindaklanjuti temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh UPT PSDKP dan membutuhkan pembinaan dan perbaikan dari Unit Kerja Pembina Teknis terkait.

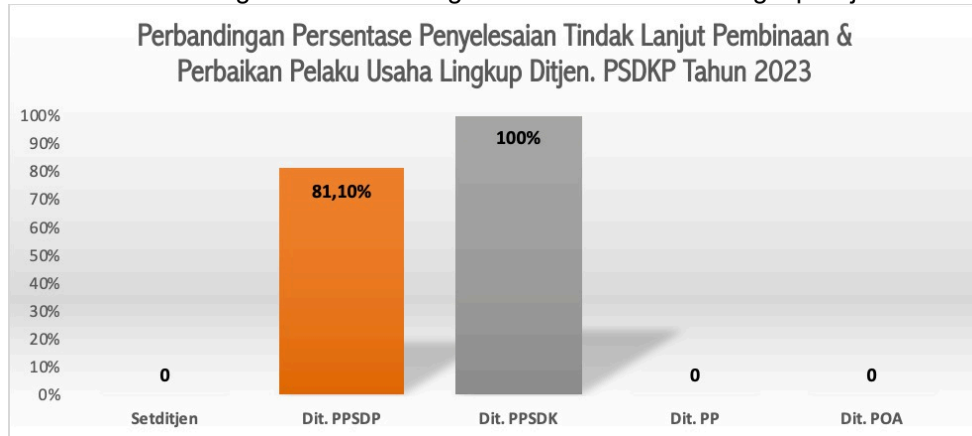
Hal tersebut juga didukung oleh Pengawas Perikanan Pusat yang berdasarkan hasil verifikasi ditemukan beberapa pelaku usaha yang membutuhkan pembinaan dan perbaikan. Direktorat PPSDP menindaklanjuti dengan penyampaian memorandum kepada Unit Kerja Pembina Teknis (Ditjen PDSPKP, Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budi Daya). Selain itu, Pengawas Perikanan Pusat melakukan koordinasi secara berkala dengan Unit Kerja Pembina Teknis.

Tabel 1.12. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan (%)	0	0	0	0	0	0	80	81,10%	0

Kemudian, jika dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2023, realisasi indikator ini Direktorat PPSDP berkedudukan sama dengan Direktorat PPSDK.

Grafik 1.5. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Melihat hasil capaian di tahun 2023, maka target tahun 2024 dapat tercapai dengan catatan Pengawas Perikanan yang ada di Pusat dapat segera menindaklanjuti hasil verifikasi yang membutuhkan pembinaan dan perbaikan kepada Unit Kerja Pembina Teknis.

6. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP (Nilai)

Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan sumber daya perikanan tahun 2023 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi capaian terhadap target sebesar 100,78% dengan nilai capaian kinerja sebesar 80,68 dari target tahunan sebesar 80%. Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan sumberdaya perikanan diperoleh dari penghitungan nilai tahapan verifikasi pembinaan dan pengembangan terhadap UPT Ditjen PSDKP dan Pemerintah Daerah.

Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP

$$X_{Binbang} = (0,5 * X_a) + (0,5 * X_b)$$

$X_{Binbang}$ Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP
 X_a Nilai Tahapan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawas Perikanan
 X_b Nilai Tahapan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pemerintah Daerah

$$\begin{aligned}
 X_{Binbang} &= (0,5 * 85) + (0,5 * 76,25) \\
 &= 42,5 + 38,13 \\
 &= 80,63
 \end{aligned}$$

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023. Keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini disebabkan adanya dukungan penuh dari UPT Ditjen PSDKP dan Pemerintah Daerah yang tidak hanya sebagai obyek penilaian tetapi sebagai subyek penilaian serta adanya koordinasi dan sinergi dengan Timja Teknis lingkup Direktorat PPSDP. Namun, indikator kinerja ini hanya dilakukan pengukuran dengan jangka waktu yang sangat singkat (3 bulan) karena itu perlu dilakukan pendalaman dan perbaikan dari sisi waktu pencapaian serta sampel unit kerja yang akan dinilai.

Keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh SDM yang kooperatif dan kompak dalam perkembangan sistem agar berjalan lebih efektif dan efisien lagi.

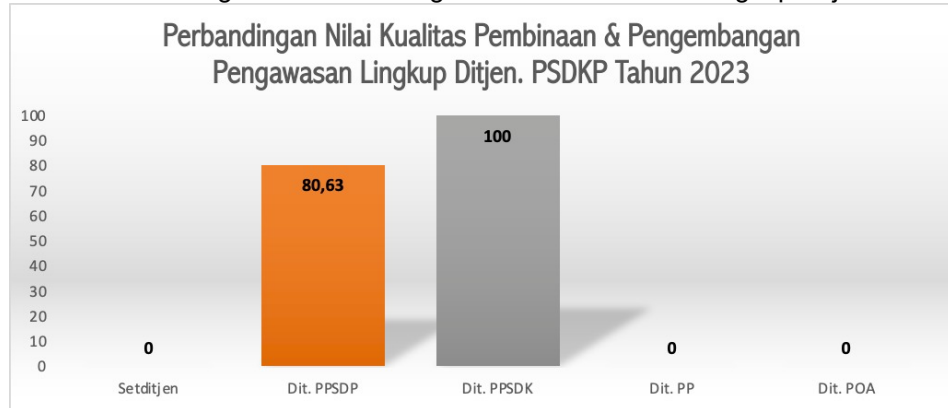
Tabel 1.13. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP (Nilai)	0	0	0	0	0	0	80	80,63	0

Indikator kinerja ini juga terdapat pada unit kerja eselon II lingkup Ditjen PSDKP tetapi memiliki ciri-ciri yang berbeda (kekhususan) dari sisi substansi dan konsepsi. Jika dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2023, realisasi

indikator ini Direktorat PPSDP berkedudukan di urutan ke-2 atas Direktorat PPSDK.

Grafik 1.6. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Sistem informasi ini digunakan oleh banyak pihak (internal KKP maupun pelaku usaha) sehingga memerlukan koordinasi yang baik agar penggunaan sistem dapat berjalan lancar. Selain koordinasi, diperlukan analisa penyempurnaan sistem yang dilakukan berkala, hal ini dilakukan agar sistem lebih optimal untuk memudahkan pekerjaan yang selanjutnya sebagai bahan pimpinan untuk penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/penindakan yang akan ditempuh.

7. Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) (Nilai)

Sistem pengawasan kapal perikanan merupakan sistem informasi pengawasan dan pemeriksaan kapal perikanan pada saat keberangkatan dan kedatangan guna mendukung pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur dan/atau optimalisasi PNBK Perikanan Pasca Produksi. Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) Tahun 2023, telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan nilai perolehan yaitu 85,86 dari target tahunan sebesar 75 yang diperoleh dari survey kepuasan Pengawas Perikanan (sampling) sebanyak 145 responden sebagai pengguna sistem yang mengukur terhadap *performance*, *information*,

efficiency, and service sistem pengawasan kapal perikanan yang diukur menggunakan skala likert.

Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO)

$$X_{eslo} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_1 + \dots + x_n)}{n} = \frac{12535}{145} = 86,45$$

X_{eslo} = Nilai keandalan sistem pengawasan kapal perikanan
 x_i = Nilai kuesioner pengguna sistem pengawasan kapal perikanan
 n = Jumlah responden

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023.

Meskipun indikator kinerja baru namun indikator kinerja Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) Tahun 2023 ini melebihi target yang ditentukan. Hal tersebut karena penggunaan sistem ini memudahkan pelaksanaan pekerjaan dalam penerbitan HPK dan SLO. Keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh SDM yang kooperatif dan kompak dalam perkembangan sistem agar berjalan lebih efektif dan efisien lagi.

Tabel 1.14. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) (Nilai)	0	0	0	0	0	0	75	86,45	0

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PSDKP karena tidak terdapat pada unit kerja Eselon II lain. Sistem informasi ini digunakan oleh banyak pihak (internal KKP maupun pelaku usaha) sehingga memerlukan koordinasi yang baik agar penggunaan sistem dapat berjalan lancar.

Selain koordinasi, diperlukan analisa penyempurnaan sistem yang dilakukan berkala, hal ini dilakukan agar sistem lebih optimal untuk memudahkan pekerjaan yang selanjutnya sebagai bahan pimpinan untuk penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/penindakan yang akan ditempuh.

8. Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan (%)

Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administrasi mencapai angka 100%, melebihi target tahunan sebesar 75%. Penanganan hasil pengawasan telah ditindaklanjuti mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Setiap hasil pemeriksaan/pengawasan yang mendapat rekomendasi sanksi khususnya yang terkait dengan pengenaan denda telah ditindaklanjuti dengan ekspose internal hingga proses rekomendasi kepada Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan

$$X_{\text{ekspint}} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i + \dots + x_n)}{n} \times 100\% = \frac{146}{146} \times 100\% = 100\%$$

X_{ekspint} = Persentase tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan lingkup Direktorat PPSDP
 x_i = Jumlah ekspose internal lingkup Direktorat PPSDP yang disele
 n = Jumlah usulan ekspose internal yang disampaikan ke Dit. PPS

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023. Meskipun indikator kinerja baru namun indikator kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan ini mencapai nilai maksimal. Hal tersebut didukung dengan adanya koordinais dengan UPT PSDKP terkait serta penyampaian memorandum dari Direktorat PPSDP kepada Direktorat

Penanganan Pelanggaran yang menangani rekomendasi sanksi yang sudah disepakati pada ekspose sebelumnya.

Selain itu, didukung juga oleh SDM Pusat dan UPT PSDKP yang telah melaksanakan pemeriksaan/pengawasan dan penanganan hasil pengawasan kegiatan usaha perikanan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Setiap unit kerja telah melaksanakan prosedur pengawasan, mengawal proses penanganan hasil pemeriksaan hingga penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas pengenaan sanksi yang telah ditetapkan.

Tabel 1.15. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan subtansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan (%)	0	0	0	0	0	0	75%	100%	0

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PSDKP karena tidak terdapat pada unit kerja Eselon II lain. Melihat hasil capaian di tahun 2023, beberapa hal yang menjadi rekomendasi untuk mencapai target di 2024 adalah koordinasi yang berkesinambungan antara UPT PSDKP yang melaksanakan pemeriksaan/pengawasan dengan Pusat yang menangani hasil pengawasan dan tindak lanjutnya. Hasil pemeriksaan/pengawasan di lapangan khususnya terkait pengenaan sanksi dapat secara simultan ditangani oleh pihak-pihak terkait.

9. Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDP (Nilai)

Nilai penyelesaian rancangan NSPK Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan selama tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 100%, NSPK yang sudah selesai perancangannya yaitu draft revisi Peraturan Dirjen PSDKP tentang Pentunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan, perhitungan berdasarkan pembobotan dari:

- Telah dilaksanakannya rapat pembahasan rancangan dengan unit kerja terkait;
- telah dilakukan uji publik NPSK dengan Komandan UPT PSDKP dan Bagian Hukum Setditjen PSDKP; dan
- Draft/rancangan NSPK telah disampaikan via memo kepada setditjen PSDKP

Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan

$$X_{\text{NSPK}} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i + \dots + x_n)}{n} = \frac{100}{1} = 100$$

X_{NSPK} = Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDP
 X_n = Jumlah rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDP yang diselesaikan
 n = Jumlah target rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDP

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024, indikator Nilai penyelesaian rancangan NSPK Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan capaiannya relatif stabil. Direktorat PPSDP setiap tahun telah menyelesaikan tugasnya dalam menyusun rancangan NSPK bidang pengawasan sumber daya perikanan. Penyusunan NSPK ini tentu saja dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dan hasil pulbaket permasalahan di lapangan sehingga mendorong percepatan penyelesaian NSPK.

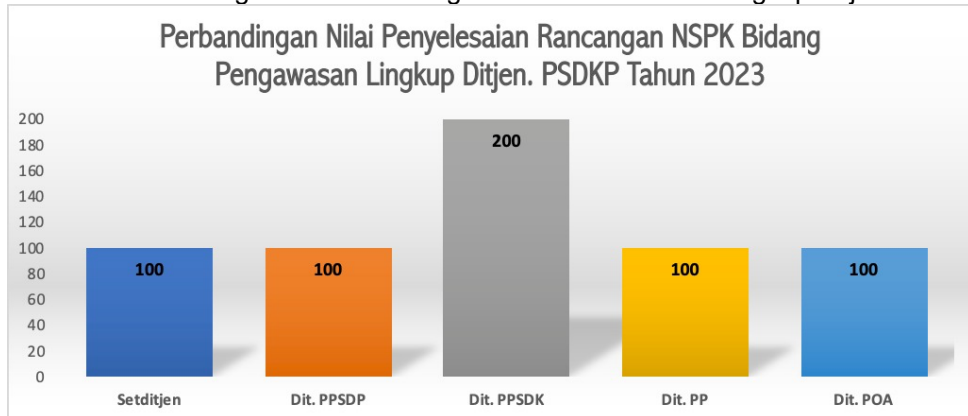
Keberhasilan ini juga didukung oleh SDM penyusunan rancangan NSPK yang andal sehingga rancangan NSPK terdokumentasikan dengan baik. Selain itu, tim penyusunan NSPK juga melakukan koordinasi secara intens dengan unit kerja terkait.

Tabel 1.16. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDP (Nilai)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100%

Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup PSDKP, rancangan NSPK lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2023 telah diselesaikan secara keseluruhan. Namun, Direktorat PPSDK menyelesaikan rancangan NSPK melebihi targetnya, sehingga capaiannya melambung lebih tinggi dari Direktorat PPSDP dan Eselon II lainnya.

Grafik 1.7. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Melihat *trend* di tahun 2023 maka target tahun 2024 dapat tercapai dengan catatan penyusunan rancangan ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan baru, sehingga diperlukan penyesuaian strategis pengawasan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku.

10. Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP (Nilai)

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan Bimtek oleh Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP, yaitu:

Kegiatan	Lokasi	Waktu	Jumlah Peserta	Rata-Rata Nilai Post Test
Bimbingan Teknis Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Berbasis Risiko	Banyuwangi	13 - 19 Juni 2023	30 Orang	90
Bimbingan Teknis Simulasi Pengawasan Program Penangkapan Ikan Terukur	Bitung	6 - 10 November 2023	30 Orang	88

Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan telah mencapai target dengan perolehan nilai 89 dari target tahunan sebesar 77. Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP diperoleh dari rata-rata tingkat pemahaman peserta Bimtek yang dilaksanakan pada lingkup Direktorat PPSDP.

Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP

$$X_{\text{bimtek}} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i + \dots + x_n)}{n} = \frac{178}{2} = 89$$

X_{bimtek} = Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP
 x_i = Tingkat pemahaman peserta suatu pelatihan/Bimtek
 n = Jumlah Pelatihan/Bimtek lingkup Direktorat PPSDP

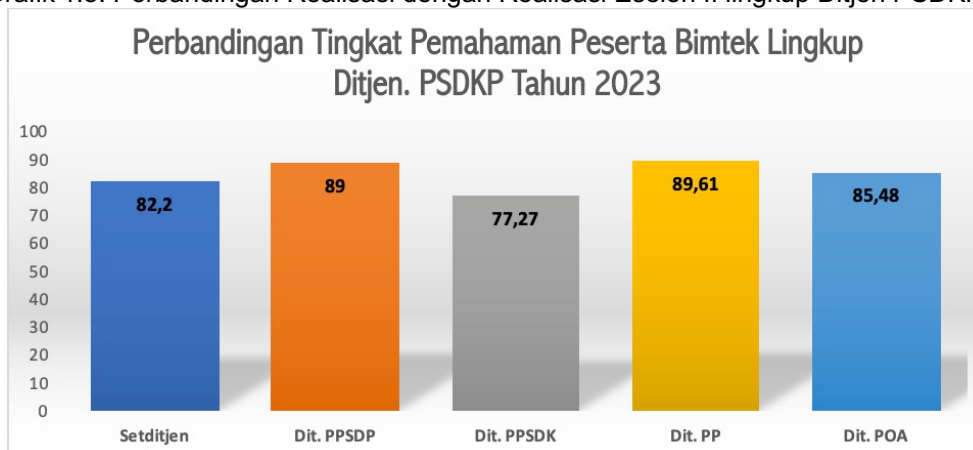
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024, terjadi kenaikan grafik pada nilai pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP. Kenaikan capaian ini memperlihatkan bahwa tingginya antusias pengawas perikanan dalam mengikuti kegiatan yang dapat menunjang kapabilitas, kapasitas dan kompetensi teknisnya. Selain itu, didukung juga oleh para narasumber yang berkompeten dan informatif dalam penyampaian materinya.

Tabel 1.17. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP (Nilai)	75	75	75	83	75	87,28	77	89	80

Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup PSDKP, Direktorat PPSDP menempati urutan ke-2 setelah Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Grafik 1.8. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP yang selalu mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2023, maka di tahun 2024 nilai capaian dapat memenuhi target nilai 80, apabila Direktorat PPSDP melakukan pengemasan kegiatan yang lebih inovatif dan interaktif baik dalam kegiatan kelas maupun lapangan.

11. Inovasi yang dihasilkan Direktorat PPSPDP (Inovasi)

Inovasi yang dihasilkan Direktorat PPSPDP pada tahun 2023 sebanyak 1 inovasi dengan tema, "Peningkatan kesadaran terkait larangan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan melalui upaya penindakan dan edukasi secara masif dan berkelanjutan" dengan target inovasi adalah, "Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait larangan pemasukan, pembudidayaan, peredaran dan pengeluaran jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan dari dalam dan/atau keluar WPPNRI".

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024, Direktorat PPSPDP senantiasa berkomitmen berinovasi dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*. Meskipun pada tahun 2023 Direktorat PPSPDP mengalami penurunan peringkat, semula di tahun 2022 mendapatkan peringkat ketiga sedangkan pada tahun 2023 tidak mendapatkan peringkat.

Dalam pelaksanaan menghasilkan inovasi tersebut, juga sudah dilakukan beberapa hal, di antaranya adalah tim yang terlibat dalam penyusunan dan pengembangan aplikasi tersebut dilakukan *assesment skill* yang bertujuan untuk melihat apakah dalam prosesnya setiap tim mengalami perubahan *skill*.

Assesment skill yang diuji yaitu kemampuan pemahaman konsep GKM, kemampuan analisis, kemampuan keahlian komunikasi, olah data dan menulis. Hasilnya yaitu setiap anggota tim mengalami peningkatan yang signifikan dari beberapa aspek yang dinilai tersebut.

Tabel 1.18. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Inovasi yang dihasilkan Direktorat PPSPDP (Inovasi)	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP, seluruh unit kerja telah memenuhi dan menciptakan inovasi pada tahun 2023.

Grafik 1.9. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Melihat proses pada tahun 2023, maka target tahun 2024 akan lebih baik jika tim berasal dari 1 bidang yang sama agar inovasi bisa lebih implementatif melihat dari kendala dan kebutuhan inovasi dari masing2 bidang, dan bisa menyesuaikan waktu dalam proses pengerjaannya.

IK3 – Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat PPSDP

12. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDP (%)

Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDP dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Pada tahun 2023, Direktorat PPSDP telah memperoleh capaian sebesar 110% dari target tahunan sebesar 100%.

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023. Meskipun indikator kinerja baru namun indikator kinerja Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDP ini melebihi target tahunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh kegiatan dan anggaran Direktorat PPSDP dalam memenuhi unsur-unsur pengukuran Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDP.

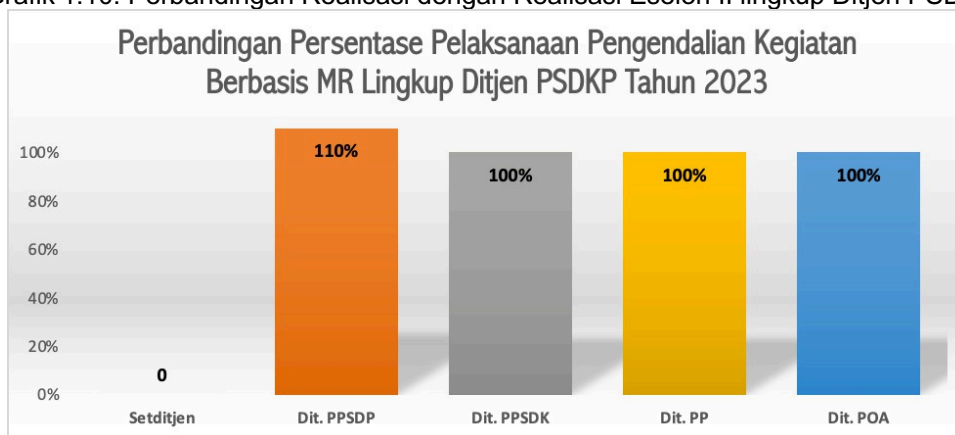
Keberhasilan ini juga didukung SDM Tim Manajemen Risiko yang andal sehingga Pemantauan Manajemen Risiko terdokumentasikan dengan baik. Selain itu, operator Manajemen Risiko juga melakukan koordinasi/rapat secara berkala kepada Tim Manajemen Risiko di Setditjen PSDKP.

Tabel 1.19. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDP (%)	0	0	0	0	0	0	100%	110%	0

Apabila dibandingkan dengan Eselon II lainnya, Direktorat PPSDP menduduki peringkat pertama.

Grafik 1.10. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Direktorat PPSDP berkomitmen untuk terus mencapai target Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDP sehingga pada tahun 2024 target yang diproyeksikan optimis dapat dicapai

13. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP (Indeks)

Pencapaian sasaran ini diidentifikasi ke dalam 1 indikator kinerja yaitu indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP. Indikator Kinerja tersebut mengukur Profesionalitas ASN berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Pada tahun 2023, IKU tersebut sudah dilakukan analisa. Direktorat PPSDP telah mencapai target dengan memperoleh nilai sebesar 84 dari target 78 dan masuk ke dalam kategori Tinggi. Nilai tersebut diambil pada laman www.ropeg.kkp.go.id per 9 Januari 2024.

The screenshot shows the 'IP ASN 2023' dashboard with a search bar and a table of unit performance. The table has columns for Unit Kerja, Jumlah Pegawai Yang Dihitung, Kualifikasi (bobot 25), Kompetensi (bobot 40), Kinerja (bobot 30), Disiplin (bobot 5), TOTAL, and Keterangan. The data is as follows:

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
16	STASIUN PSDKP BIAK	44	21.2	84.8 %	38.81	97.03 %	24.77	82.57 %	5	100 %	89.78	TINGGI
17	DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN	35	22.4	89.6 %	29.69	74.23 %	27.29	90.97 %	5	100 %	84.38	TINGGI
18	DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	41	22.39	89.56 %	31.49	78.72 %	25.12	83.73 %	5	100 %	84	TINGGI
19	DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN	34	21.65	86.6 %	36.06	90.15 %	25.15	83.83 %	5	100 %	87.85	TINGGI

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024, terjadi kenaikan grafik pada indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP. Kenaikan capaian ini memperlihatkan bahwa semakin banyak ASN lingkup Direktorat PPSDP yang mengikuti kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dan didukung dengan kesadaran semua pihak dalam upaya peningkatan kapasitas ASN.

Tabel 1.20. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP (Indeks)	72	70	73	80	77	82,22	78	84	76

Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP, Direktorat PPSDP menempati urutan ke-4 setelah Direktorat POA, Direktorat PP, dan Direktorat PPSDK.

Grafik 1.11. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Melihat kenaikan capaian dari tahun ke tahun yang relatif meningkat, Direktorat PPSDP berkomitmen untuk terus meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan jabatan yang diampunya.

14. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PPSDP (Nilai)

Penilaian mandiri SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB. Sepanjang tahun 2023, Direktorat PPSDP telah mencapai target dengan memperoleh capaian sebesar 82,60 dari target tahunan sebesar 80,5.

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023. Meskipun baru, indikator ini dapat mencapai target. Hal ini disebabkan oleh komitmennya Direktorat PPSDP dalam pengadministrasian kegiatan dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Selain itu, keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh SDM Perencanaan

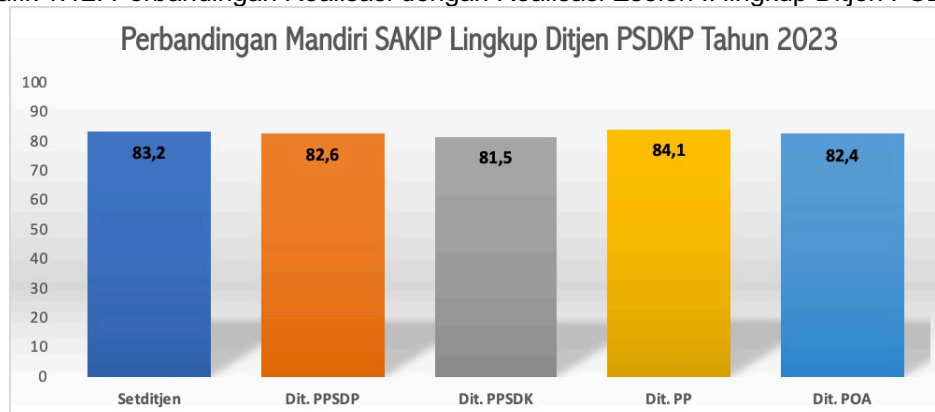
dan Pelaporan telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Kinerja setiap tahunnya yang diselenggarakan oleh Setditjen PSDKP. Sehingga, administrasi pengelolaan kinerja dapat terdokumentasikan dengan baik.

Tabel 1.21. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PPSDP (Nilai)	0	0	0	0	0	0	80,5	82,6	0

Apabila dibandingkan dengan unit kerja Eselon II Ditjen PSDKP, Direktorat PPSDP menempati urutan ke-3 diungguli oleh Direktorat PP dan Setditjen PSDKP.

Grafik 1.12. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Melihat tren pada tahun 2023, Direktorat PPSDP senantiasa mempertahankan pemenuhan penilaian mandiri SAKIP di tahun 2024.

15. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s.d 30 September 2023 (Triwulan IV 2022 s.d. Triwulan III 2023) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit

eselon II pusat dan unit pelaksana teknis sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023.

Sepanjang tahun 2023, Direktorat PPSDP tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, sehingga capaiannya sama dengan target sebesar 75 %

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024, terjadi kenaikan grafik pada persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan. Namun, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022, karena sepanjang tahun 2023, Direktorat PPSDP tidak terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti.

Tabel 1.22. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	82%	76%	65%	100%	70%	100%	75%	75%	80%

Indikator kinerja ini diampu oleh 5 unit kerja, pada tahun 2023, capaian kinerja Direktorat PPSDP, Direktorat PPSDK, dan Direktorat PP berkedudukan sama dengan target sebesar 75%, sedangkan Setditjen PSDKP dan Direktorat POA berkedudukan sama karena telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi dengan capaian sebesar 100%.

Grafik 1.13. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



16. Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Direktorat PPSDP (Nilai)

Nilai implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PPSDP telah mencapai target dengan memperoleh nilai sebesar 25,67 dari target nilai sebesar 21. Hal ini bersumber dari lembar kerja yang dinilai secara mandiri oleh masing-masing unit kerja dan didukung penuh oleh pegawai Direktorat PPSDP dalam menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Direktorat PPSDP.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, indikator ini mengalami penurunan nilai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- Hanya sebagian besar aspek Program Budaya Kerja yang telah dimonitoring dan dievaluasi, sehingga mendapatkan bobot B;
- Direktorat PPSDP tidak masuk dalam peringkat 3 besar dalam perlombaan Inovasi Ditjen PSDKP tahun 2023, sehingga mendapatkan bobot D;
- Tidak terdapat pegawai yang menghasilkan Sumbang Saran (SS) sehingga mendapat bobot C untuk 5 poin lainnya;
- Tidak menampilkan panduan kerapian dan kebersihan tempat kerja, sehingga mendapatkan bobot D;
- Tidak ada tempat kerja dalam keadaan rapi dan bersih setiap hari, sehingga mendapat bobot D;
- Direktorat PPSDP tidak menyelenggarakan dinding apresiasi, sehingga mendapat bobot C;

- g. Tidak ada pegawai yang berpartisipasi pada kegiatan Dinding Apresiasi, sehingga mendapat bobot D.

Tabel 1.23. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Direktorat PPSDP (Nilai)	0	0	0	0	21	27,67	21	25,67	0

Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP, Direktorat PPSDP mendapatkan kedudukan ke-4 setelah Direktorat POA, Direktorat PP, dan Direktorat PPSDK.

Grafik 1.14. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Dengan menurunnya nilai indikator ini maka Direktorat PPSDP berkomitmen untuk memperbaiki kebersihan dan kerapian ruang kerja yang tersedia, serta melengkapi dinding apresiasi dan Sumbang Saran (SS) yang belum tersedia di tahun 2023.

17. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP (%)

Selama tahun 2023 capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP sebesar 112,50%. Capaian kinerja lingkup Direktorat PPSDP telah tercapai melebihi target yang ditetapkan sebesar 92%.

Capaian kinerja tidak lepas dari partisipasi aktif seluruh Pejabat Eselon II, Koordinator, Subkoordinator dan pelaksana lingkup Direktorat PPSDP. Pencapaian sasaran ini diidentifikasi ke dalam 1 indikator kinerja yaitu persentase unit kerja Direktorat PPSDP yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar. Perhitungan capaian ini didasarkan atas komponen yaitu: Dokumen (10%), Keikutsertaan (20%), dan Keaktifan (70%). Metode perhitungan keikutsertaan dan keaktifan menggunakan bantuan aplikasi portal yang merupakan wadah bagi Pegawai KKP dalam berbagi dan mengakses informasi.

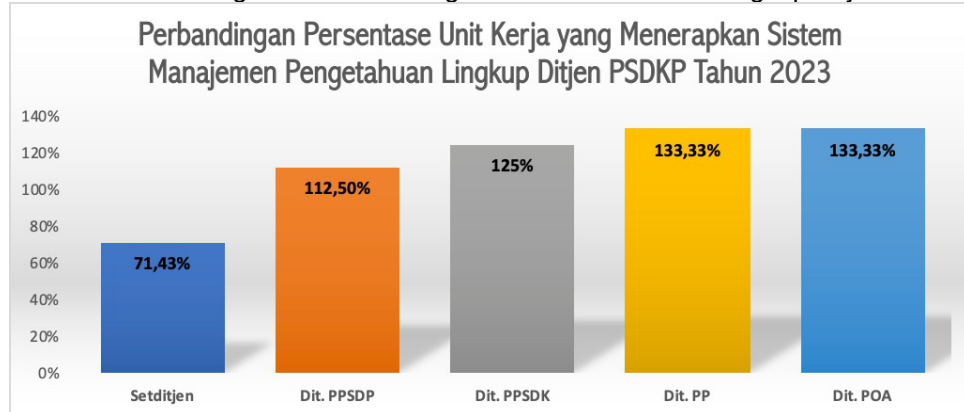
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024, terjadi kenaikan grafik secara berkala pada persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP.

Tabel 1.24. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP (%)	82%	76%	84%	98%	86%	96,76%	92%	112,50%	90%

Apabila dibandingkan dengan unit Eselon II Ditjen PSDKP, Direktorat PPSDP menempati urutan ke-4 setelah Direktorat POA, Direktorat PP, dan Direktorat PPSDK.

Grafik 1.15. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Penunjang keberhasilan yang akan dilakukan dalam mempertahankan dan meningkatkan nilai manajemen pengetahuan, Direktorat PPSDP akan membuat jadwal unggahan kegiatan. Selain itu, akan memantau siapa saja yang belum unggah tiap bulannya agar dapat diberitahu sehingga tidak terjadi lupa unggah kegiatan dan dapat memperbaiki nilai manajemen pengetahuan dari segi keaktifan.

Direktorat PPSDP dalam mengunggah agenda pada tiap bulannya ke dalam aplikasi Portal mengalami peningkatan. Target tahun 2024 dengan persentase 90% akan tercapai didukung dengan komitmen Direktorat PPSDP untuk meningkatkan keaktifan pegawai dalam menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup Direktorat PPSDP.

18. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP (%)

Selama tahun 2023 kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP telah mencapai target sebesar 100%. Perhitungan ini didasari dari tersedianya semua dokumen pendukung BMN yang terdiri dari beberapa komponen dan sub komponen yang memiliki bobot masing-masing.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024, Direktorat PPSDP relatif stabil. Hal ini di dipengaruhi oleh komitmen Direktorat PPSDP dalam memenuhi unsur-unsur pengukuran kepatuhan pengelolaan BMN. Selain itu,

keberhasilan ini juga didukung oleh SDM pengelola BMN yang andal sehingga pengelolaan BMN terdokumentasikan dengan baik. Selain itu, operator pengelola BMN juga melakukan koordinasi secara berkala kepada Tim Pengelola BMN di Setditjen PSDKP.

Tabel 1.25. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP (%)	0	0	100%	100%	100%	100%	75,5	100%	100%

Jika dibandingkan dengan unit kerja Eselon II Ditjen PSDKP, kelima unit kerja memiliki kedudukan yang sama dengan nilai 100%.

Grafik 1.16. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Melihat tren di tahun 2023, maka target tahun 2024 dapat tercapai dengan catatan penatausahaan BMN harus lebih ditingkatkan sehingga dokumen dan penatausahaan BMN berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

19. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup Direktorat PPSDP (%)

Pada tahun 2023 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup Direktorat PPSDP sebesar 88,75 (%) melebihi dari target sebesar 77%, nilai tersebut didapatkan dengan memenuhi beberapa indikator antara lain telah menyusun manajemen risiko

PBJ strategis, perencanaan dan persiapan pengadaan, pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE, kesesuaian tahap pelaksanaan, laporan penyelenggaraan PBJ, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Triwulan I hingga Triwulan III Tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024, tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDP menurun dari 100% menjadi 88,75% namun nilai tersebut masih melebihi dari target tahunan sebesar 77%.

Penurunan tersebut disebabkan adanya beberapa kebijakan yang belum ditetapkan di awal tahun sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan kontrak dalam bentuk Surat Perjanjian. Untuk SDM yang menangani PBJ rutin mengikuti Bimtek tentang peningkatan pengetahuan yang diadakan oleh Biro Umum PBJ dan LKPP.

Tabel 1.26. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-tahun Sebelumnya dan RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup Direktorat PPSDP (%)	0	0	100%	100%	100%	100%	75,50%	88,75%	100%

Apabila dibandingkan dengan unit kerja Eselon II Ditjen PSDKP, Direktorat PPSDP berada di urutan ke-5.

Grafik 1.17. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Eselon II lingkup Ditjen PSDKP



Direktorat PPSDP berkomitmen untuk kedepannya nilai kepatuhan barang/jasa harus ditingkatkan dengan cara melakukan kontrak berbentuk surat perjanjian pada awal tahun.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat PPSDP memiliki alokasi anggaran awal TA 2023 sebesar Rp7,850,000,000 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Setelah mengalami Automatic Adjustment (AA) 1 kali kemudian dana tersebut dialihkan ke satuan kerja lain sehingga total anggaran Direktorat PPSDP menjadi Rp5,668,485,000 (Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp5,657,844,303 (Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) atau 99,81% dari pagu anggaran. Pada tahun 2023 telah dilakukan revisi POK sebanyak 8 kali dan diperoleh nilai efisiensi sebesar 3,68.

3.4 EFISIENSI

Guna meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan serta memberikan pelayanan yang prima kepada stakeholder, telah dilakukan upaya penggunaan sumber daya secara maksimal pada tahun 2022. Sumber daya yang sangat mendukung efisiensi pencapaian target setiap indikator kinerja adalah penggunaan anggaran. Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Berdasarkan hasil pengukuran melalui aplikasi Smart Kemenkeu, nilai efisiensi penggunaan anggaran Direktorat PPSDP adalah 3,68. Capaian nilai efisiensi ini didukung oleh tingkat penyerapan anggaran dengan persentase 99,79%. Rincian

efisiensi anggaran pada setiap kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sebagaimana terlampir.



BAB IV

PENUTUP


Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat PPSDP pada periode triwulan bersangkutan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun kesimpulan dan saran kegiatan penyusunan laporan kinerja Tahun 2023 adalah:

1.1. Kesimpulan

- a. Periode Tahun 2023 Direktorat PPSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,88%.
- b. Terdapat beberapa capaian indikator kinerja yang menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022, diantaranya:
 - Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
 - Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Direktorat PPSDP (Nilai); dan
 - Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDP.

1.2. Saran

- a. Untuk meningkatkan dan mengontrol Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebaiknya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- b. Upaya-upaya pre-emptif dan preventif perlu dilakukan guna meningkatkan persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap perundang-undangan.
- c. Untuk meningkatkan nilai implementasi program budaya kerja perlu dihasilkan Sumbang Saran (SS), menampilkan panduan

- 
-
- kerapian dan kebersihan tempat kerja, menyiapkan tempat kerja dalam keadaan rapi dan bersih setiap hari dan menyelenggarakan dinding apresiasi.
- d. Untuk meningkatkan kepatuhan pengadaan barang/jasa perlu dilakukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sesuai perencanaan di awal.
 - e. Perlu dipertahankan agar seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.dipsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drama Panca Putra**

Jabatan : Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Direktur Pengawasan Pengelolaan
Sumber Daya Perikanan


Drama Panca Putra

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN			
SK1.1	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif	1. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab (nilai)	73
SK1.2	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	2. Persentase Penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan (%)	80
		3. Persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan (%)	75
SK1.3	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	4. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDP (%)	100
		5. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDP (%)	100
		6. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP (indeks)	78
		7. Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP	77
		8. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat PPSDP (nilai)	90
		9. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		10. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	21
		11. Jumlah inovasi yang dihasilkan Direktorat PPSDP (inovasi)	1
		12. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP (%)	92
		13. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP (%)	77,5
		14. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDP (%)	77,5

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	7.850.000.000
<i>SK1.1</i>	<i>Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif</i>	
<i>SK1.2</i>	<i>Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan</i>	
<i>SK1.3</i>	<i>Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP</i>	
Total Anggaran		7.850.000.000

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Direktur Pengawasan Pengelolaan
Sumber Daya Perikanan



Drama Panca Putra



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drama Panca Putra**

Jabatan : Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Desember 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Direktur Pengawasan Pengelolaan
Sumber Daya Perikanan

Drama Panca Putra

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA PERIKANAN**

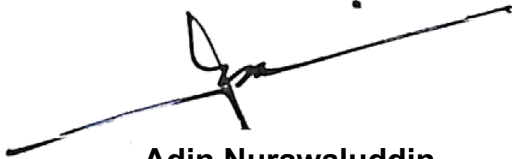
NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
01	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif	01	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab (Nilai)	73
02	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	02	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	80%
03	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	03	Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional (Nilai)	100
		04	Nilai kualitas penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Nilai)	80
		05	Persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan (%)	70%
		06	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP (Nilai)	80
		07	Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) (Nilai)	75
		08	Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan subrtansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan (%)	75%
		09	Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDP (Nilai)	100
		10	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP (Nilai)	77
		11	Inovasi pengawasan sumber daya perikanan yang dihasilkan (Inovasi)	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
04	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat PPSDP	12 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDP (%)	100%
		13 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (Indeks)	78
		14 Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PPSDP (Nilai)	80,5
		15 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75%
		16 Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Direktorat PPSDP (Nilai)	21
		17 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (%)	92%
		18 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP (%)	77,5%
		19 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup Direktorat PPSDP (%)	77,5%

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	
1	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang meningkat	1.000.000.000
2	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	5.582.261.000
3	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	1.126.739.000
Total Anggaran		7.850.000.000

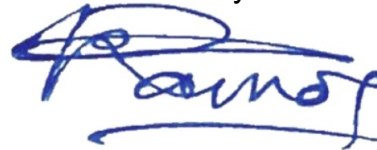
Jakarta, 5 Desember 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Direktur Pengawasan Pengelolaan
Sumber Daya Perikanan



Drama Panca Putra